

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA TERHADAP BURMA

(PERIODE 2004-2009)

ABSTRAK



Disusun oleh:

SYSTRA MARTHA LAURETTA

151040337

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

2011

Kebijakan luar negeri India ini mempunyai dua hal menarik, dan peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan regim junta militer terhadap demonstrasi masa yang menuntut peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 27 September 2007, adalah penyambung dari kedua hal tersebut.

Pertama: India menunjukkan sikap politik dan kebijakan luar negeri yang berbeda dengan apa yang pernah negara itu tonjolkan pada dua dasawarsa sebelumnya, ketika India menunjukkan secara tegas keberpihakannya pada aktivis pendukung demokrasi Burma yang juga melakukan demonstrasi pada 1988, bahkan memutuskan sama sekali bentuk dukungan politik terhadap kaum demokratis yang menang dalam pemilu pada tahun 1990, namun dibatalkan secara sepihak oleh regim junta.

Kontras dengan sikap di atas, sikap politik yang ditunjukkan India terhadap tindak pelanggaran HAM Junta pada penghujung tahun 2007 justru sangat bertolak belakang dengan sikap politik India pada 1988. Pemerintah India menolak mencampuri persoalan politik domestik Burma.

Kedua: masih terkait dengan pandangan pertama di atas, meski berbeda sudut pandang, di mana lebih menyorot perbedaan sikap India sebagai negara demokrasi liberal dengan negara-negara demokrasi liberal lainnya. Negara-negara demokrasi lain “konsisten” mengutuk keras aksi-aksi tindak pelanggaran HAM yang dilakukan junta, termasuk dalam peristiwa terakhir di atas, sementara pemerintah India belakangan justru memilih berlindung di balik prinsip *non intervention* dalam politik domestik Burma.

Secara umum bisa dikatakan bahwa dalam periode 2004-2009 masa pemerintahan Manmohan Singh, LEP mencapai tahap lanjut yang tinggal dimatangkan lagi dalam implementasinya di Burma.

Jika pada masa-masa sebelumnya kerjasama kedua negara lebih banyak membicarakan sektor-sektor, jangkauan, *agreement*, dan implementasinya, maka dalam periode 2004-2007 kedua negara sudah mulai membicarakan cara-cara mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang muncul antara keduanya. Tampak terlihat bahwa, kedua negara sama-sama merasakan manfaat yang positif dari capaian-capaian kerjasama ekonomi yang sudah mereka kerjakan. Ada simbiosis mutualis dari kerjasama tersebut.

Semua uraian tersebut membawa penulis pada kesimpulan bahwa, kebijakan India di Burma adalah suatu kebijakan yang lebih berkarakter *realistik* ketimbang *idealistik*. Dalam ilmu HI yang pertama berkaitan dengan gagasan realis Morgenthau dan penerus-penerusnya yang menekankan pentingnya maksimalisasi kepentingan nasional suatu negara di atas segala-galanya, dalam hubungannya dengan negara lain.

Sementara yang kedua berkaitan dengan idealisme liberal yang memandang bahwa ketika suatu negara demokrasi maka negara tersebut akan menjalankan politik luar negeri yang bersendikan nilai-nilai demokrasi.

Dalam soal kebijakan India di Burma citra diri sebagai negara demokrasi memang penting, namun tidak lebih penting dari pencapaian *national interest*. Semua ini menjelaskan mengapa India menunjukkan sikap yang berbeda dengan negara-negara demokrasi seperti Amerika, Jepang, Australia, dll, yang cenderung memilih jalan liberal dalam politik negeri negara-negara itu di Burma.